

Analisis Kebijakan Pendidikan Terhadap Penerapan Sistem Domisili Pada Sekolah Menengah Atas di Kabupaten Bogor (Studi Implementasi SPMB 2025)

Rizky Dwi Arista¹, Syairul Bahar^{2*}, Zaharah³

^{1,2,3} Program Studi Tadris IPS, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Tangerang Selatan, Banten

***Email Penulis korespondensi:** svairu@uinjkt.ac.id

Abstrak

Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2025 merupakan kebijakan baru yang menggantikan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan pendekatan berbasis domisili untuk mewujudkan pemerataan akses pendidikan. Sebagai kebijakan yang baru diterapkan, implementasinya di daerah dengan karakteristik geografis dan demografis yang beragam seperti Kabupaten Bogor memerlukan kajian empiris. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan SPMB 2025 jalur domisili pada jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kabupaten Bogor serta implikasinya terhadap pemerataan akses pendidikan. Kebaruan penelitian ini terletak pada kajian terhadap implementasi awal SPMB 2025 berbasis domisili di Kabupaten Bogor yang memiliki karakteristik wilayah perkotaan dan pedesaan yang berbeda. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara semi-terstruktur, dan dokumentasi yang melibatkan pihak Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I Kabupaten Bogor, kepala sekolah, panitia SPMB, serta orang tua calon peserta didik pada SMAN 2 Cibinong, SMAN 1 Tajurhalang, dan SMAN 1 Rumpin. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan teknik triangulasi sumber dan teknik untuk menjamin keabsahan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi SPMB 2025 berbasis domisili secara umum telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan memberikan kemudahan akses pendidikan secara geografis bagi peserta didik. Namun, pemerataan akses pendidikan belum sepenuhnya tercapai akibat ketimpangan daya tampung, perbedaan karakteristik wilayah, serta persebaran sekolah menengah atas negeri yang belum merata. Temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan penerimaan murid berbasis domisili tidak hanya ditentukan oleh kejelasan regulasi, tetapi juga memerlukan pemerataan sarana pendidikan dan penguatan tata kelola implementasi di tingkat daerah.

Kata kunci: Kebijakan Pendidikan, SPMB 2025, Sistem Domisili, Pemerataan Akses Pendidikan.

Pendahuluan

Pendidikan merupakan instrumen strategis negara dalam membangun kualitas sumber daya manusia sekaligus mewujudkan keadilan sosial melalui pemerataan kesempatan memperoleh layanan pendidikan (Danin, 2024). Dalam perspektif kebijakan publik, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjamin akses pendidikan yang adil, setara, dan berkualitas bagi seluruh warga negara, termasuk pada jenjang pendidikan menengah. Salah satu bentuk intervensi pemerintah dalam mewujudkan tujuan tersebut diwujudkan melalui kebijakan penerimaan murid baru sebagai bagian dari tata kelola pendidikan nasional (Novi Winarti, Khairi Rahmi, 2023).

Sebagai upaya memperkuat pemerataan akses pendidikan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menetapkan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) yang mulai diberlakukan pada tahun 2025 melalui Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025. Kebijakan ini menggantikan mekanisme Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan menempatkan domisili sebagai salah satu dasar utama dalam proses seleksi peserta didik pada sekolah negeri. Melalui kebijakan tersebut, pemerintah berupaya mendekatkan layanan pendidikan dengan tempat tinggal peserta didik serta mendorong pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang berkualitas. Namun, keberhasilan suatu kebijakan tidak hanya ditentukan oleh kejelasan regulasi, melainkan juga oleh efektivitas implementasinya di tingkat daerah dan satuan pendidikan (Ibrahim & Kris Setyaningsih, 2024).

Berbagai penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa kebijakan penerimaan peserta didik berbasis wilayah belum sepenuhnya mampu mewujudkan pemerataan akses pendidikan. Pradewi dan Rukiyati (2019) menemukan bahwa sistem zonasi yang bertujuan mendekatkan layanan pendidikan justru berpotensi membatasi pilihan peserta didik apabila tidak diimbangi dengan pemerataan sarana dan prasarana pendidikan. Penelitian lain juga mengungkap adanya berbagai kendala implementasi, seperti keterbatasan daya tampung sekolah, ketidakjelasan mekanisme pelaksanaan, serta potensi manipulasi data domisili yang dapat memengaruhi keadilan dalam proses seleksi (Ismira, 2024). Temuan tersebut menunjukkan bahwa kebijakan penerimaan murid berbasis wilayah masih menyisakan berbagai persoalan implementasi yang memerlukan evaluasi berkelanjutan (Muhammad Octavian Qhuraydillah & Teguh Yuwono, 2025).

Kabupaten Bogor merupakan salah satu wilayah dengan karakteristik geografis dan demografis yang beragam, mulai dari kawasan perkotaan yang padat seperti Cibinong hingga wilayah yang relatif terpencar seperti Rumpin. Kondisi tersebut menyebabkan persebaran sekolah menengah atas negeri dan daya tampung sekolah tidak selalu sebanding dengan jumlah calon peserta didik di setiap wilayah. Perbedaan karakteristik wilayah tersebut berpotensi memengaruhi efektivitas penerapan sistem domisili dalam SPMB 2025, khususnya dalam mewujudkan pemerataan akses pendidikan bagi masyarakat.

Meskipun kajian mengenai sistem zonasi dan penerimaan peserta didik telah banyak dilakukan, penelitian yang secara khusus mengkaji implementasi Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2025 berbasis domisili masih relatif terbatas. Sebagian besar penelitian terdahulu lebih berfokus pada evaluasi kebijakan PPDB berbasis zonasi dan aspek normatif regulasi, sementara kajian mengenai implementasi kebijakan baru SPMB 2025 pada konteks lokal belum banyak dilakukan. Dengan demikian, terdapat kesenjangan penelitian (research gap) terkait bagaimana implementasi SPMB 2025 berbasis domisili dijalankan pada daerah dengan karakteristik wilayah yang beragam serta implikasinya terhadap pemerataan akses pendidikan.

Kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada analisis implementasi awal kebijakan SPMB 2025 berbasis domisili pada jenjang sekolah menengah atas di Kabupaten Bogor sebagai daerah yang memiliki karakteristik wilayah perkotaan dan perdesaan yang berbeda. Penelitian ini tidak hanya menelaah pelaksanaan kebijakan berdasarkan ketentuan regulasi, tetapi juga menganalisis implikasinya terhadap pemerataan akses pendidikan serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat implementasi kebijakan di tingkat daerah.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2025 berbasis domisili pada sekolah menengah atas di Kabupaten Bogor serta implikasinya terhadap pemerataan akses pendidikan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris bagi pengembangan kajian implementasi kebijakan pendidikan sekaligus menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan SPMB berbasis domisili.

1. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai implementasi kebijakan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2025 berbasis domisili pada jenjang sekolah menengah atas di Kabupaten Bogor. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti memahami fenomena implementasi kebijakan secara komprehensif berdasarkan pengalaman, persepsi, dan interaksi para aktor yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan.

Penelitian dilaksanakan pada tiga sekolah menengah atas negeri di Kabupaten Bogor, yaitu SMAN 2 Cibinong, SMAN 1 Tajurhalang, dan SMAN 1 Rumpin. Pemilihan lokasi dilakukan secara purposive dengan mempertimbangkan perbedaan karakteristik wilayah, yaitu kawasan perkotaan dan wilayah pinggiran, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai implementasi kebijakan SPMB 2025 berbasis domisili dalam konteks lokal yang beragam.

Pemilihan informan dilakukan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu memilih individu yang dianggap memiliki pengetahuan dan pengalaman yang relevan dengan fokus penelitian. Informan penelitian berjumlah 13 orang yang terdiri atas unsur Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I Kabupaten Bogor, kepala sekolah, panitia pelaksana SPMB, serta orang tua calon peserta didik pada masing-masing sekolah. Kriteria pemilihan informan didasarkan pada keterlibatan langsung dalam pelaksanaan maupun pengalaman mengikuti proses

penerimaan murid baru tahun 2025, sehingga informasi yang diperoleh dapat menggambarkan implementasi kebijakan secara lebih mendalam.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara semi-terstruktur, dan dokumentasi. Observasi digunakan untuk mengamati pelaksanaan SPMB 2025 di lingkungan sekolah. Wawancara semi-terstruktur dilakukan untuk menggali persepsi, pengalaman, serta pandangan informan mengenai pelaksanaan kebijakan sistem domisili. Sementara itu, dokumentasi digunakan untuk memperoleh data pendukung berupa peraturan perundang-undangan, dokumen pelaksanaan SPMB, laporan, serta arsip yang berkaitan dengan implementasi kebijakan (Siti Romdona & Silvia Senja Junista, 2025).

Analisis data dilakukan secara interaktif dengan mengacu pada model Miles dan Huberman yang meliputi tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Reduksi data dilakukan dengan menyeleksi dan mengelompokkan data sesuai fokus penelitian, kemudian data disajikan dalam bentuk uraian naratif untuk memudahkan interpretasi. Tahap akhir dilakukan melalui penarikan kesimpulan secara berkesinambungan berdasarkan temuan yang diperoleh selama proses penelitian.

Untuk menjamin validitas dan keabsahan data, penelitian ini menerapkan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai informan, sedangkan triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penerapan kedua teknik tersebut bertujuan untuk meningkatkan kredibilitas temuan penelitian serta memastikan konsistensi data yang diperoleh (Kumara, 2018).

2. Hasil dan Pembahasan

Implementasi Sistem Domisili dalam SPMB 2025 di Kabupaten Bogor

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2025 berbasis domisili pada jenjang sekolah menengah atas di Kabupaten Bogor secara umum telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025. Pemerintah daerah melalui Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I Kabupaten Bogor berperan dalam melakukan koordinasi, sosialisasi, serta pengawasan pelaksanaan kebijakan, sedangkan sekolah melaksanakan proses penerimaan murid berdasarkan petunjuk teknis yang telah ditetapkan. Temuan ini menunjukkan bahwa dari aspek regulasi dan struktur pelaksana, implementasi kebijakan telah memiliki landasan yang relatif jelas.

Meskipun demikian, efektivitas implementasi kebijakan belum sepenuhnya berbanding lurus dengan tercapainya tujuan pemerataan akses pendidikan. Hasil wawancara dan observasi menunjukkan bahwa masih terdapat perbedaan tingkat pemahaman masyarakat terhadap mekanisme SPMB 2025, terutama terkait persyaratan administrasi dan ketentuan domisili. Selain itu, ketimpangan daya tampung sekolah serta perbedaan karakteristik wilayah menyebabkan distribusi peserta didik belum berlangsung secara seimbang. Temuan ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara tujuan normatif kebijakan dengan realitas implementasi di lapangan. Dengan kata lain, keberhasilan pelaksanaan kebijakan secara

administratif belum secara otomatis menghasilkan pemerataan akses pendidikan secara substantif.

Dari perspektif aksesibilitas, sistem domisili memberikan dampak positif berupa semakin dekatnya jarak antara tempat tinggal peserta didik dengan sekolah yang dituju. Kondisi tersebut berimplikasi pada berkurangnya biaya transportasi serta meningkatnya kemudahan masyarakat dalam mengakses layanan pendidikan menengah. Temuan ini memperkuat tujuan utama SPMB 2025 yang berorientasi pada pemerataan akses pendidikan berdasarkan kedekatan geografis.

Namun, penelitian ini juga menemukan bahwa pemerataan akses pendidikan tidak hanya ditentukan oleh kedekatan jarak, melainkan dipengaruhi oleh ketersediaan dan persebaran satuan pendidikan. Sekolah-sekolah yang berada di wilayah dengan kepadatan penduduk tinggi mengalami jumlah pendaftar yang jauh lebih besar dibandingkan daya tampung yang tersedia, sedangkan sekolah yang berada di wilayah pinggiran cenderung memiliki jumlah pendaftar yang lebih rendah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sistem domisili belum sepenuhnya mampu mengatasi ketimpangan akses pendidikan antarwilayah. Dengan demikian, pemerataan secara geografis belum selalu diikuti oleh pemerataan kesempatan memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas.

Temuan penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Pradewi dan Rukiyati (2019) yang menyatakan bahwa kebijakan penerimaan peserta didik berbasis wilayah memerlukan dukungan pemerataan sarana dan prasarana pendidikan agar dapat mewujudkan keadilan akses secara optimal. Selain itu, hasil penelitian ini memperkuat temuan Ismira (2024) yang menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penerimaan murid masih menghadapi berbagai kendala administratif dan keterbatasan daya tampung sekolah. Di sisi lain, penelitian ini memiliki perbedaan dengan temuan Rahmatika Yulianti dan Puji Astuti (2023) yang menyoroti dominasi praktik manipulasi domisili sebagai dampak utama kebijakan zonasi. Pada konteks Kabupaten Bogor, persoalan yang lebih menonjol bukan terletak pada praktik kecurangan, melainkan pada ketimpangan persebaran sekolah dan perbedaan karakteristik wilayah yang menyebabkan kesempatan memperoleh pendidikan belum merata.

Faktor pendukung implementasi kebijakan SPMB 2025 berasal dari adanya regulasi yang jelas, dukungan pemerintah daerah, sistem pendaftaran berbasis daring, serta keterlibatan sekolah dan panitia pelaksana dalam menjalankan tugas sesuai dengan kewenangannya. Sebaliknya, faktor penghambat implementasi meliputi keterbatasan daya tampung sekolah, persebaran sekolah menengah atas negeri yang belum merata, kualitas sosialisasi kebijakan yang belum optimal, serta potensi manipulasi data domisili. Temuan tersebut menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pendidikan tidak hanya dipengaruhi oleh aspek regulasi, tetapi juga oleh kesiapan infrastruktur pendidikan, kapasitas kelembagaan, serta tingkat pemahaman masyarakat terhadap kebijakan yang diterapkan.

Secara lebih luas, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi SPMB 2025 berbasis domisili di Kabupaten Bogor telah mampu meningkatkan akses pendidikan dari aspek geografis, tetapi belum sepenuhnya berhasil mewujudkan pemerataan akses pendidikan secara

menyeluruh. Hal tersebut menegaskan bahwa keberhasilan kebijakan penerimaan murid berbasis domisili tidak hanya bergantung pada desain regulasi, tetapi juga memerlukan pemerataan sarana pendidikan, penguatan tata kelola implementasi, serta perencanaan distribusi sekolah yang lebih proporsional sesuai karakteristik wilayah. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi empiris terhadap kajian implementasi kebijakan pendidikan dengan menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan berbasis domisili sangat dipengaruhi oleh konteks lokal dan kapasitas daerah dalam mengelola pemerataan layanan pendidikan.

4. Simpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2025 berbasis domisili pada jenjang sekolah menengah atas di Kabupaten Bogor secara umum telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mampu meningkatkan akses pendidikan dari aspek kedekatan geografis. Namun, tujuan pemerataan akses pendidikan belum sepenuhnya tercapai karena masih dipengaruhi oleh ketimpangan daya tampung sekolah, perbedaan karakteristik wilayah, serta persebaran sekolah menengah atas negeri yang belum merata.

Temuan tersebut menegaskan bahwa efektivitas kebijakan penerimaan murid berbasis domisili tidak hanya bergantung pada kejelasan regulasi, tetapi juga pada kesiapan infrastruktur pendidikan dan kapasitas tata kelola di tingkat daerah. Kontribusi utama penelitian ini terletak pada temuan bahwa permasalahan implementasi SPMB 2025 di Kabupaten Bogor lebih dipengaruhi oleh kondisi struktural dan karakteristik wilayah dibandingkan persoalan administratif semata.

Implikasinya, upaya mewujudkan pemerataan akses pendidikan melalui SPMB berbasis domisili perlu disertai dengan pemerataan sarana pendidikan, perencanaan distribusi sekolah yang lebih proporsional, serta penguatan sosialisasi dan tata kelola pelaksanaan kebijakan. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah sekaligus memperkaya kajian implementasi kebijakan pendidikan dalam konteks penerimaan murid berbasis domisili.

Daftar Pustaka

- Abdoellah, A., & Rusfiana, Y. (2016). *Teori dan analisis kebijakan publik*. Alfabeta.
- Danin, B. (2024). *Teori-teori governancy dan kebijakan publik kontemporer*. BRIN.
- Kumara, A. R. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif*. Universitas Ahmad Dahlan.
- Marwiyah, S. (2022). *Kebijakan publik*. Universitas Panca Marga Probolinggo.
- Ibrahim, I., Setyaningsih, K., & Nursa'diah, D. (2024). Evaluasi penerimaan peserta didik baru sistem zonasi. *Dirasah: Jurnal Studi Ilmu dan Manajemen Pendidikan Islam*, 7(2), 549–563.
- Ismira, R. T. (2024). Analisis penerimaan peserta didik baru berbasis zonasi di Indonesia. *Didaktik: Jurnal Ilmiah PGSD FKIP Universitas Mandiri*, 10(1), 1–12.
- Kristian, I. (2023). Kebijakan publik dan tantangan implementasi di Indonesia. *Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial*, 21(2), 88–98.
- Muhammad Octavian Qhuraydillah, M. O., Yuwono, T., & Anwar, L. K. (2025). Kebijakan zonasi dalam pemenuhan hak pendidikan warga negara (Studi kasus sistem zonasi SMA Negeri 1 dan 3 Semarang). *Journal of Politic and Government Studies*, 14(1), 1–15.
- Winarti, N., Rahmi, K., & Charin, R. O. P. (2023). Harapan pemerataan menghadirkan kesenjangan: Analisis dampak kebijakan sistem zonasi penerimaan peserta didik baru (PPDB) Kota Tanjungpinang. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, 49(2), 211–224. <https://doi.org/10.33701/jipwp.v49i2.3579>
- Romdona, S., Junista, S. S., & Gultom, A. (2025). Teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan kuesioner. *JISOSEPOL: Jurnal Ilmu Sosial Ekonomi dan Politik*, 3(1), 1–10.
- Sulistiyosari, Y., Wardana, A., & Dewi, S. I. A. (2023). School zoning and equal education access in Indonesia. *International Journal of Evaluation and Research in Education (IJERE)*, 12(2), 839–847. <https://doi.org/10.11591/ijere.v12i2.22488>
- Pradewi, G. I., & Rukiyati. (2019). Kebijakan sistem zonasi dalam perspektif pendidikan. *Jurnal Manajemen dan Supervisi Pendidikan*, 4(1), 28–34.
- Yulianti, R., & Astuti, P. (2023). Studi evaluasi dampak kebijakan zonasi terhadap peserta didik baru tingkat SMA di Kecamatan Purwokerto Timur tahun ajaran 2022/2023. *Departement of Political and Government Studies, Universitas Diponegoro*.
- Ramadhania, R., & Suwitri, S. (2025). *Implementasi kebijakan jalur domisili pada sistem penerimaan murid baru sekolah menengah pertama di SMPN 143 Jakarta Utara* [Skripsi, Universitas Diponegoro]. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro.